

SKRIPSI

**PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS, DAN
EFISIENSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIMEDIASI OLEH**

BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI DIY

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Resta Kuswara

312432566

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2026

TUGAS AKHIR
SKRIPSI
PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS,
DAN EFISIENSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI YANG
DIMEDIASI OLEH BELANJA MODAL
KABUPATEN/KOTA DI DIY

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RESTA KUSWARA

Nomor Induk Mahasiswa: 312432566

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Rudy Badrudin, Dr., M.Si

Penguji

Drs. Algifari, M.Si.

Yogyakarta, 15 Juni 2026
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH KMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIMEDIASI OLEH BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI DIY

Oleh:

Resta Kuswara

312432566

ABSTRACT

This study examines the effect of regional financial independence, revenue effectiveness, and budget-management efficiency on economic growth, with capital expenditure positioned as a mediating variable. The research covers five regencies/municipalities in the Special Region of Yogyakarta (DIY) — Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, and Yogyakarta City — over 2019–2024, using secondary panel data drawn from Budget Realization Reports (APBD), Local Government Financial Statements (LKPD), and regional GDP at constant prices (30 pooled observations, census/saturated sampling). Data were analyzed with multiple linear regression complemented by the Sobel test for mediation. The results show that revenue effectiveness has a positive and significant effect on economic growth, whereas regional financial independence and budget efficiency show no significant effect. Capital expenditure fails to mediate the effect of any of the three financial-performance indicators on economic growth, mainly because none of them significantly predicts the level of capital expenditure itself. These findings indicate that regional fiscal capacity and budgetary thrift alone are not sufficient to drive regional economic growth unless followed by a productive reallocation of the budget toward capital spending.

Keywords: *regional financial independence; revenue effectiveness; budget efficiency; capital expenditure; economic growth*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH KMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIMEDIASI OLEH BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI DIY

Oleh:

Resta Kuswara

312432566

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Penelitian dilakukan pada lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, selama periode 2019–2024, menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (30 unit observasi, teknik sampling jenuh/sensus). Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda yang dilengkapi dengan uji Sobel untuk pengujian mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara kemandirian keuangan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan. Belanja modal tidak terbukti memediasi pengaruh ketiga indikator kinerja keuangan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama karena ketiganya tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran belanja modal itu sendiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal dan penghematan anggaran daerah saja belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti dengan realokasi anggaran secara produktif ke belanja modal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kata Kunci: kemandirian keuangan daerah; efektivitas pendapatan; efisiensi pengelolaan keuangan; belanja modal; pertumbuhan ekonomi



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola keuangan daerah dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing (Ani & Dwirandra, 2014). Kewenangan tersebut idealnya diikuti oleh kemampuan fiskal daerah yang memadai, tercermin dari tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas dalam merealisasikan pendapatan, dan efisiensi dalam mengelola anggaran belanja.

Data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2019–2024 memperlihatkan variasi capaian antar kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi (3,97%), diikuti Kabupaten Bantul (3,73%), Kota Yogyakarta (3,60%), Kabupaten Kulon Progo (3,58%), dan Kabupaten Sleman dengan capaian terendah (3,40%). Pada saat yang sama, tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di DIY masih tergolong rendah berkisar antara 27,27% (Kulon Progo) hingga 33,65% (Sleman) sementara efektivitas pendapatan daerah relatif baik, seluruhnya berada di atas 100%, dan efisiensi anggaran berkisar pada rentang 99,72%–100,57%. Sebaliknya, alokasi belanja modal justru relatif terbatas, berkisar antara 11,28% (Kulon Progo) hingga 13,67% (Sleman) dari total belanja daerah. Pola ini menyiratkan adanya ketidaksesuaian antara kinerja pengelolaan pendapatan/anggaran yang tergolong baik dengan alokasi belanja produktif yang belum optimal.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat (Bisma & Susanto, 2010).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daerah dengan kemandirian tinggi memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan alokasi anggaran pembangunan. Namun demikian, tingginya kemandirian tidak serta-merta berdampak pada pertumbuhan ekonomi apabila peningkatan PAD belum diarahkan pada sektor produktif (Nurulita, Mawardi, & Suryanto, 2018). Persoalan serupa juga relevan pada level pemerintah pusat maupun daerah manapun: kapasitas fiskal baik berupa penerimaan sendiri maupun kekayaan daerah tidak otomatis diterjemahkan menjadi kinerja yang lebih baik apabila tata kelola dan arah belanjanya belum tepat sasaran. Studi Pramudiati dan Siregar (2018) terhadap pemerintah daerah di DIY dan Jawa Tengah, misalnya, menemukan bahwa kekayaan daerah (total aset) berpengaruh positif terhadap adopsi standar akuntansi berbasis akrual, tetapi pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah (rasio surplus atas aset) justru tidak signifikan mengindikasikan bahwa besarnya sumber daya fiskal daerah tidak secara otomatis berkorelasi dengan capaian kinerja yang lebih baik jika tidak dikelola secara tepat.

Belanja modal merupakan komponen pengeluaran pemerintah daerah yang secara teoretis memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan aset tetap berupa jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lain yang meningkatkan produktivitas masyarakat (Jaeni & Anggana, 2016). Akan tetapi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa belanja modal di berbagai daerah belum sepenuhnya diarahkan pada infrastruktur produktif, melainkan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non-produktif seperti pengadaan gedung dan kendaraan dinas (Linawati & Solikah, 2020). Penelitian Sinaga, Zalukhu, dan Collyn (2023) menemukan bahwa belanja modal dapat berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan kapasitas fiskal daerah dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya ketika alokasi belanja diarahkan pada sektor strategis.

Perilaku alokasi belanja modal itu sendiri tidak berdiri sendiri, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh dinamika institusional dan politik anggaran yang lebih luas. Fatmawati,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Fitrady, dan Widodo (2025), dalam kajian atas 34 negara berpendapatan menengah periode 2000–2022, menemukan bahwa belanja pemerintah termasuk belanja pada urusan ekonomi yang bersifat kapital cenderung meningkat menjelang periode elektoral (political budget cycle) dan sangat dipengaruhi oleh kualitas kontrol korupsi serta tingkat demokrasi, bukan semata-mata oleh kapasitas fiskal yang tersedia. Implikasinya, pola alokasi belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia berpotensi pula dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional dan siklus penganggaran tahunan, sehingga hubungan antara kinerja keuangan daerah dan besarnya belanja modal tidak selalu bersifat linear.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara empiris pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY, dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Penelitian ini melengkapi kajian-kajian terdahulu dengan menggabungkan tiga dimensi kinerja keuangan daerah sekaligus (kemandirian, efektivitas, efisiensi) dalam satu model mediasi, sehingga dapat menjelaskan secara lebih komprehensif mekanisme hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. *Teori Desentralisasi Fiskal*

Teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972) menjelaskan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah. Pemerintah daerah dipandang memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat lokal sehingga kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih efektif dan efisien. Empat pilar utama desentralisasi fiskal meliputi revenue assignment (kewenangan menggali PAD), expenditure assignment

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(kewenangan menentukan arah belanja, termasuk belanja modal), intergovernmental transfer (dana perimbangan untuk mengatasi ketimpangan fiskal), dan local autonomy (kewenangan menentukan prioritas pembangunan). Kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang terbentuk melalui proses desentralisasi tersebut (Linawati & Solikah, 2020).

2. *Teori Keuangan Publik*

Musgrave (1959) menjelaskan tiga fungsi utama pemerintah dalam pengelolaan fiskal, yaitu fungsi alokasi (penyediaan barang publik, termasuk melalui belanja modal), fungsi distribusi (pemerataan melalui subsidi dan bantuan sosial), dan fungsi stabilisasi (menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari fungsi alokasi tersebut. Dimensi akuntabilitas pengelolaan keuangan publik juga tecermin dari kepatuhan pada standar akuntansi pemerintahan; Pramudiati dan Siregar (2018) menunjukkan bahwa pengadopsian standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah di Indonesia turut dipengaruhi oleh karakteristik daerah — termasuk kekayaan daerah dan latar belakang pendidikan pimpinan — sejalan dengan prinsip New Public Management yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sektor publik yang lebih tinggi.

3. *Teori Belanja Publik*

Hukum Wagner menyatakan bahwa belanja pemerintah akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat modern, sementara teori Keynesian memandang belanja pemerintah, khususnya belanja modal, sebagai instrumen penting untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berperan membangun infrastruktur jalan,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sarana transportasi publik yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan menarik investasi.

4. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*

Model pertumbuhan ekonomi Solow (1956) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal (termasuk modal fisik pemerintah), tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Belanja modal pemerintah daerah merupakan bentuk investasi fisik yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kelancaran distribusi barang dan jasa, konektivitas wilayah, serta kapasitas ekonomi jangka panjang.

5. *Teori Mediasi*

Pengujian peran variabel mediasi dalam penelitian ini mengacu pada kerangka Baron dan Kenny (1986), yang mensyaratkan bahwa suatu variabel dapat dinyatakan memediasi hubungan antara variabel independen dan dependen apabila variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi, dan variabel mediasi tersebut selanjutnya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh tidak langsung tersebut diuji lebih lanjut menggunakan uji Sobel.

6. *Pengembangan Hipotesis*

a. *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.*

Menurut teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972), daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi akan lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Baeti

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(2013) serta Linawati dan Solikah (2020) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H1: Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

- b. Pengaruh Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi.** Efektivitas pendapatan daerah menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai target yang ditetapkan, dan merupakan bagian dari fungsi alokasi pemerintah dalam menghimpun sumber daya fiskal (Musgrave, 1959). Sinaga, Zalukhu, dan Collyn (2023) menemukan bahwa efektivitas pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika peningkatan pendapatan diikuti alokasi belanja yang produktif.

H2: Efektivitas pendapatan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

- c. Pengaruh Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.** Efisiensi pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menggunakan anggaran secara hemat dan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik (Musgrave, 1959). Nurulita, Mawardi, dan Suryanto (2018) serta Sinaga, Zalukhu, dan Collyn (2023) menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama apabila efisiensi tersebut tidak mengurangi belanja produktif. Sebagai pembanding, pada konteks kinerja keuangan pemerintah daerah, Pramudiati dan Siregar (2018) justru menemukan bahwa besaran belanja (expense) pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap rasio kinerja keuangan (surplus atas aset), yang mengindikasikan bahwa hubungan antara besaran/efisiensi penggunaan anggaran dan capaian kinerja tidak selalu searah dan dapat bergantung pada bagaimana anggaran tersebut dialokasikan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H3: Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

d. Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi. Menurut teori pertumbuhan Solow (1956), akumulasi modal fisik merupakan salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan daerah yang baik — tecermin dari tingginya kemandirian keuangan, efektivitas pendapatan, dan efisiensi pengelolaan anggaran — idealnya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ke belanja modal, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinaga, Zalukhu, dan Collyn (2023) membuktikan bahwa belanja modal berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, besaran dan arah belanja modal juga dapat dipengaruhi faktor di luar kinerja keuangan murni, seperti siklus anggaran dan tekanan institusional-politik (Fatmawati, Fitradhy, & Widodo, 2025), sehingga hubungan mediasi tersebut tidak selalu konsisten teruji pada seluruh konteks daerah.

H4: Belanja modal memediasi pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

H5: Belanja modal memediasi pengaruh efektivitas pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

H6: Belanja modal memediasi pengaruh efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research) untuk menguji hubungan kausal antarvariabel berdasarkan teori dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bukti empiris, sejalan dengan pendekatan yang digunakan Sinaga, Zalukhu, dan Collyn (2023). Populasi penelitian adalah seluruh data keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY (Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta) selama periode 2019–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus), sehingga seluruh populasi 5 kabupaten/kota $\times$ 6 tahun dijadikan sampel, menghasilkan 30 unit observasi, sejalan dengan pendekatan Linawati dan Solikah (2020).

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota di DIY, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Realisasi APBD tahun 2019–2024, dan publikasi PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dari BPS.

1. Definisi Operasional Variabel

Kemandirian keuangan daerah (X1) diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah ($KKD = \frac{RPAD}{TRPD} \times 100\%$); semakin tinggi rasio ini, semakin kuat kapasitas fiskal daerah (Sinaga, Zalukhu, & Collyn, 2023). Efektivitas (X2) diukur dengan rasio realisasi PAD terhadap anggaran PAD ($\text{Efektivitas} = \frac{RPAD}{APAD} \times 100\%$), dengan nilai $\geq 100\%$ menunjukkan kinerja sangat efektif (Nurulita, Mawardi, & Suryanto, 2018). Efisiensi (X3) diukur dengan rasio total realisasi belanja daerah terhadap total realisasi pendapatan daerah ($\text{Efisiensi} = \frac{TRBD}{TRPD} \times 100\%$). Belanja modal (Z) diukur dengan rasio realisasi belanja modal terhadap total realisasi belanja daerah ($BM = \frac{RBM}{TRBD} \times 100\%$) dan berperan sebagai variabel mediasi (Sinaga, Zalukhu, & Collyn, 2023). Pertumbuhan ekonomi (Y) diukur dari persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan ($PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$) (Baeti, 2013).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas Kolmogorov–Smirnov, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi Durbin–Watson), analisis regresi linier berganda dengan tiga model (model 1: X1, X2, X3 terhadap Y; model 2: X1, X2, X3 terhadap Z; model 3: X1, X2, X3, dan Z terhadap Y), uji kelayakan model (uji F dan koefisien determinasi R^2), uji hipotesis parsial (uji t), serta uji Sobel untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung (mediasi) mengikuti kerangka Baron dan Kenny (1986). Pengolahan data dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel penelitian berdasarkan 30 unit observasi (5 kabupaten/kota $\times$ 6 tahun) disajikan pada Tabel 1.

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Kemandirian (X1)	30	0,121	0,411	0,252	0,096
Efektivitas (X2)	30	0,835	1,304	1,065	0,104
Efisiensi (X3)	30	0,893	1,015	0,988	0,027
Belanja Modal (Z)	30	0,068	0,252	0,137	0,042
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	30	-0,041	0,066	0,030	0,032

Sumber: Output IBM SPSS Versi 26 (diolah)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 0,252 (25,2%) menunjukkan tingkat kemandirian yang masih tergolong rendah, sedangkan rata-rata efektivitas sebesar 1,065 (di atas 100%) menunjukkan kinerja realisasi pendapatan yang secara umum sangat baik. Rata-rata efisiensi sebesar 0,988 mendekati titik optimal, sementara rata-rata belanja modal (13,7% dari total belanja) tergolong relatif terbatas. Nilai minimum pertumbuhan ekonomi yang negatif (-0,041) mengindikasikan adanya kontraksi ekonomi pada sebagian observasi, konsisten dengan dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

b. Uji Kelayakan Model

Hasil uji F pada model ketiga (X1, X2, X3, dan Z terhadap Y) menghasilkan nilai F hitung sebesar 8,828 dengan signifikansi 0,000 ($<0,05$), yang menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ringkasan koefisien determinasi (R^2) untuk ketiga model regresi disajikan pada Tabel 2.

Model	Variabel Dependen	R	R Square	Adjusted R Square
Model 1 (X1, X2, X3)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	0,545	0,297	0,216
Model 2 (X1, X2, X3)	Belanja Modal (Z)	0,200	0,040	-0,071
Model 3 (X1, X2, X3, Z)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	0,765	0,585	0,519

Sumber: Output IBM SPSS Versi 26 (diolah)

Model ketiga mampu menjelaskan 51,9% variasi pertumbuhan ekonomi (Adjusted $R^2 = 0,519$), jauh lebih tinggi dibandingkan model pertama yang hanya melibatkan tiga

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

variabel kinerja keuangan tanpa belanja modal (21,6%). Sebaliknya, model kedua yang menempatkan belanja modal sebagai variabel dependen menghasilkan Adjusted R² negatif (-0,071), menandakan bahwa kemandirian keuangan daerah, efektivitas, dan efisiensi hampir tidak memiliki daya jelas terhadap variasi belanja modal.

c. Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji regresi linier berganda dan uji t untuk pengujian hipotesis pengaruh langsung (H1–H3) disajikan pada Tabel 3.

Model	Variabel	Koef. B	Beta	t	Sig.	Keterangan
1 (→Y)	Kemandirian (X1)	0,027	0,080	0,487	0,631	Tidak signifikan
1 (→Y)	Efektivitas (X2)	0,131	0,426	2,584	0,016	Signifikan
1 (→Y)	Efisiensi (X3)	0,360	0,303	1,838	0,078	Tidak signifikan
2 (→Z)	Kemandirian (X1)	-0,030	-0,068	-0,354	0,726	Tidak signifikan
2 (→Z)	Efektivitas (X2)	0,059	0,147	0,763	0,452	Tidak signifikan
2 (→Z)	Efisiensi (X3)	-0,209	-0,135	-0,702	0,489	Tidak signifikan
3 (→Y)	Kemandirian (X1)	0,014	0,043	0,331	0,743	Tidak signifikan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Model	Variabel	Koef. B	Beta	t	Sig.	Keterangan
3 (→Y)	Efektivitas (X2)	0,156	0,507	3,880	0,001	Signifikan
3 (→Y)	Efisiensi (X3)	0,272	0,229	1,756	0,091	Tidak signifikan
3 (→Y)	Belanja Modal (Z)	-0,420	-0,548	-4,170	0,000	Signifikan (negatif)

Sumber: Output IBM SPSS Versi 26 (diolah)

Untuk menguji peran mediasi belanja modal (H4–H6), signifikansi pengaruh tidak langsung diuji lebih lanjut dengan uji Sobel. Hasil pengujian mediasi dan ringkasan keputusan atas keenam hipotesis disajikan pada Tabel 4.

Hipotesis	Jalur	Sig. Jalur a (X→Z)	Statistik Sobel	p-value Sobel	Keputusan
H1	X1 → Y	-	-	-	Ditolak (sig. 0,631 > 0,05)
H2	X2 → Y	-	-	-	Diterima (sig. 0,016 < 0,05)
H3	X3 → Y	-	-	-	Ditolak (sig. 0,078 > 0,05)
H4	X1 → Z → Y	0,726	0,356	0,722	Ditolak
H5	X2 → Z → Y	0,452	-3,655	0,000257	Ditolak*
H6	X3 → Z → Y	0,489	0,692	0,489	Ditolak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Sumber: Output IBM SPSS Versi 26 dan hasil uji Sobel (diolah). *Meskipun statistik Sobel untuk jalur $X2 \rightarrow Z \rightarrow Y$ menunjukkan nilai p di bawah 0,05, hipotesis mediasi tetap dinyatakan tidak terpenuhi karena syarat mediasi menurut Baron dan Kenny (1986) — yaitu pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel mediasi (jalur a) — tidak tercapai (sig. $0,452 > 0,05$).*

Pembahasan

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (H1)

Hasil pengujian menunjukkan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (sig. $0,631 > 0,05$), sehingga H1 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di kabupaten/kota DIY masih relatif kecil dibandingkan dana transfer pemerintah pusat, sehingga ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan tetap terbatas. Selain itu, peningkatan PAD belum sepenuhnya diarahkan pada sektor produktif, karena sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk belanja operasional dan belanja pegawai. Struktur perekonomian DIY yang didominasi sektor pendidikan, pariwisata, dan jasa turut memengaruhi lemahnya hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini konsisten dengan pengamatan Pramudiati dan Siregar (2018) bahwa kekayaan daerah (total aset) tidak secara otomatis berkorelasi positif dengan kinerja keuangan daerah — mengindikasikan bahwa besarnya kapasitas fiskal semata belum cukup tanpa disertai kualitas pengelolaan dan arah alokasi anggaran yang tepat.

Pengaruh Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi (H2)

Efektivitas pendapatan daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (sig. $0,016 < 0,05$; Beta = 0,426 pada model 1 dan 0,507 pada model 3), sehingga H2 diterima. Keberhasilan pemerintah daerah merealisasikan target pendapatan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mencerminkan pengelolaan keuangan yang optimal serta memberikan pemerintah daerah sumber pembiayaan yang memadai untuk melaksanakan program pembangunan, menyediakan fasilitas publik, dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Kondisi DIY sebagai daerah dengan potensi besar pada sektor pendidikan, pariwisata, UMKM, dan jasa turut mendukung tercapainya efektivitas pengelolaan pendapatan tersebut. Temuan ini konsisten dengan teori keuangan publik (Musgrave, 1959) yang menempatkan efektivitas penghimpunan sumber daya fiskal sebagai bagian dari fungsi alokasi pemerintah, serta mendukung hasil penelitian Sinaga, Zalukhu, dan Collyn (2023).

Pengaruh Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi (H3)

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ($\text{sig. } 0,078 > 0,05$), sehingga H3 ditolak, meskipun arah koefisiennya positif dan mendekati ambang signifikansi 10%. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tampaknya lebih berorientasi pada penghematan belanja dibandingkan peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Penghematan belanja daerah yang terlalu besar berpotensi justru mengurangi aktivitas pembangunan dan menurunkan daya dorong pemerintah terhadap perekonomian. Pola ini sejalan dengan temuan Pramudiati dan Siregar (2018) bahwa besaran belanja (expense) pemerintah daerah berhubungan negatif dengan rasio kinerja keuangan, yang menegaskan bahwa hubungan antara ukuran/efisiensi penggunaan anggaran dan hasil ekonomi yang dicapai tidak selalu proporsional, melainkan sangat bergantung pada kualitas alokasi belanja pada sektor produktif.

Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi (H4–H6)

Ketiga hipotesis mediasi ditolak. Pada jalur kemandirian keuangan daerah (H4), pengaruh X1 terhadap belanja modal tidak signifikan ($\text{sig. } 0,726 > 0,05$) dan diperkuat oleh hasil uji Sobel yang juga tidak signifikan ($p = 0,722$), sehingga syarat mediasi menurut Baron dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kenny (1986) tidak terpenuhi. Pada jalur efektivitas (H5), meskipun statistik Sobel menunjukkan nilai signifikan ($p = 0,000257$), jalur a ($X_2 \rightarrow Z$) itu sendiri tidak signifikan ($\text{sig. } 0,452 > 0,05$), sehingga syarat dasar mediasi tetap tidak terpenuhi dan pengaruh efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi lebih bersifat langsung, tanpa melalui belanja modal. Pada jalur efisiensi (H6), baik jalur a maupun uji Sobel sama-sama tidak signifikan ($\text{sig. } 0,489$; $p \text{ Sobel} = 0,489$).

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian, efektivitas, maupun efisiensi keuangan daerah belum diikuti oleh peningkatan proporsional pada belanja modal kemungkinan karena sebagian besar tambahan pendapatan atau hasil penghematan anggaran masih dialokasikan pada belanja rutin dan belanja operasional. Menariknya, belanja modal justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada model ketiga ($\text{Beta} = -0,548$; $\text{sig. } 0,000$), yang mengindikasikan bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah di DIY belum tentu diarahkan pada proyek-proyek yang produktif secara ekonomi dalam jangka pendek, sejalan dengan temuan Linawati dan Solikah (2020) bahwa belanja modal di sejumlah daerah masih banyak digunakan untuk kebutuhan non-produktif seperti pengadaan gedung dan kendaraan dinas. Fenomena ini juga sejalan dengan argumen Fatmawati, Fitriady, dan Widodo (2025) bahwa besaran dan arah belanja pemerintah termasuk belanja pada urusan yang bersifat kapital kerap lebih dipengaruhi oleh dinamika institusional, siklus anggaran tahunan, dan pertimbangan politik anggaran, dibandingkan semata-mata oleh indikator kinerja keuangan daerah, sehingga hubungan antara kinerja keuangan dan alokasi belanja modal tidak selalu bersifat linear maupun berjalan searah dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari tiga indikator kinerja keuangan daerah yang diuji, hanya efektivitas pendapatan daerah yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara kemandirian keuangan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan. Belanja modal tidak terbukti berperan sebagai variabel mediasi pada hubungan ketiga indikator tersebut dengan pertumbuhan ekonomi, karena kemandirian keuangan daerah, efektivitas, dan efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran belanja modal itu sendiri. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal dan penghematan anggaran daerah saja belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti dengan realokasi anggaran secara lebih produktif ke belanja modal yang berorientasi pada infrastruktur dan sektor unggulan daerah.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini menyarankan pentingnya memperkuat efektivitas pengelolaan pendapatan melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan PAD melalui pengembangan sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, serta mengarahkan alokasi belanja modal secara lebih strategis pada infrastruktur dan fasilitas publik yang produktif, tanpa hanya berorientasi pada penghematan anggaran semata. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian ke provinsi lain di Indonesia, menambahkan variabel lain seperti investasi, tingkat pengangguran, inflasi, dan indeks pembangunan manusia, memperpanjang periode pengamatan, serta mempertimbangkan pendekatan analisis data panel atau Structural Equation Modeling (SEM) untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini terbatas pada lima kabupaten/kota di DIY selama periode 2019–2024 dengan 30 unit observasi, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, L. A., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(1), 22–34.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 89–100.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182.
- Bisma, I. D., & Susanto, I. (2010). Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 1–15.
- Fatmawati, S., Fitriady, A., & Widodo, T. (2025). Politically Driven Cycles in Fiscal Policy: Evidence from Disaggregated Budgets in Middle-Income Countries. *Economies*, 13(6), 151. <https://doi.org/10.3390/economies13060151>
- Jaeni, & Anggana, R. (2016). Belanja Modal dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 8(1), 45–59.
- Linawati, & Solikah, M. (2020). Kinerja Keuangan Daerah yang Dimoderasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Daerah*.
- Musgrave, R. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Nurulita, Mawardi, & Suryanto. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pramudiati, N., & Siregar, B. (2018). Local Government Characteristics, Adoption of Accrual Accounting, and Government Performance. *The Journal of Social Sciences Research*, Special Issue 2, 153–160. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi2.153.160>

Sinaga, M., Zalukhu, R. S., & Collyn, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1070–1081.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.

